



## Fakultas Ekonomi Siap Sempurnakan Metode Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan salah satu gebrakan awal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yakni Nadiem Makarim. Hal ini tentu mendapatkan banyak sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang (UM). Ditemui diruang Dekan FE pada Selasa (24/03), Pak Cipto menyampaikan beberapa pendapatnya dan rencana FE dalam menanggapi merdeka belajar tersebut.

Reporter: Rifdah Ananda Baharuddin –  
Internship Humas UM

Memang, begitu “Mas Menteri” dilantik, banyak sekali gebrakan yang muncul sehingga memberi kejutan

kepada masyarakat. Setiap kejutan itu tentunya harus ditanggapi dengan positif. Salah satu kebijakan kejutan itu adalah Merdeka Belajar. Ketika saya mengikuti perkembangan dari media sosial, inti dari

merdeka belajar sendiri adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendekati diri, sehingga mereka dapat menggunakan materi yang telah didapatkan selama perkuliahan.

## Laporan Khusus

UM sendiri memberi respons yang luar biasa. Beberapa kolega dosen di jurusan sendiri mulai meninjau kembali kurikulum yang ada. Beberapa mata kuliah yang dirasa terlalu teoritis kemungkinan akan direvisi dengan beberapa materi yang bersifat praktisi. Misalnya, Fakultas Ekonomi (FE) sedang gencar dalam membuka peluang kerjasama dengan dunia industri dan usaha. Salah satu hal yang telah dilakukan yaitu menandatangani beberapa dokumen yang berkaitan dengan MoA dengan beberapa lembaga terkait. Hal ini dilakukan agar mahasiswa FE dapat langsung melakukan praktik 'bekerja' sebagai upaya penambahan skill dilapangan.

Fakultas Ekonomi telah melakukan beberapa perubahan, salah satunya adalah kurikulum. Kami mengundang pihak eksternal yang terdiri dari stakeholder perusahaan dan praktisi kurikulum untuk memberikan masukan terkait penyempurnaan kurikulum yang sudah ada. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diinginkan oleh perusahaan/instansi atas kualitas lulusan dari UM. Pada dasarnya, kamu tidak melakukan perubahan mendasar, namun hanya membutuhkan masukan dari pihak eksternal. Jadi beberapa materi yang sekiranya tidak dibutuhkan dalam masyarakat akan kita hapus dan digantikan dengan masukan yang telah diberikan. Kegiatan ini masih kami lakukan hingga sekarang, namun mengingat adanya covid-19 menyebabkan beberapa

pertemuan harus ditunda.

Bagaimana strategi FE untuk mempercepat proses praktik bekerja di tempat industri dan usaha tersebut ?

Magang atau KKN Alternatif adalah praktik yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman bekerja. Dengan adanya kebijakan dari Mas Menteri ini kami semakin gencar untuk membangun kerjasama dengan dunia usaha. Bahkan mungkin memperkuat posisi FE sebagai fakultas yang responsif atas inovasi dari Kementerian. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan mengarahkan kerjasama dengan pihak BUMD atau BUMN, jadi tidak terlalu berpatok pada dunia usaha/industri semata. Secara teknis, mahasiswa FE diberikan kebebasan untuk menentukan institusi/perusahaan yang akan dituju atau memanfaatkan institusi/perusahaan yang sudah kerjasama dengan FE sebelumnya, dengan cara mengajukan proposal dan kemudian akan dibantu oleh FE. Sehingga ketika mahasiswa diterima ditempat baru maka kami akan tindak lanjuti dengan membuat MoA untuk menjalin kerja sama dan memperluas jaringan.

Salah satu kegiatan kerja sama yang telah FE lakukan adalah menyelenggarakan seminar nasional dan kuliah tamu dengan mengundang pembicara dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Sebelum seminar berlangsung, perwakilan dari OJK menyampaikan secara terbuka bahwa OJK

menerima mahasiswa UM jika ingin melakukan magang di instansi tersebut. Hal ini sebagai langkah nyata bagaimana FE mendukung kebijakan Kemendikbud tentang merdeka belajar. Dalam pernyataannya, pihak OJK juga terbuka dengan kerja sama antar institusi, khususnya institusi pendidikan seperti UM. Ini dapat ditunjukkan dengan komitmen OJK sebagai lembaga eksternal yang bersedia jika diundang kembali oleh UM untuk memberikan kuliah umum atau pembekalan bagi mahasiswa di dunia kerja.

Jika menilik lagi komponen dari konsep "Merdeka Belajar" yang disampaikan oleh Mendikbud, terdapat komponen pembelajaran mahasiswa di luar kampus maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Tujuannya untuk memberi ruang seluas – luasnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus (dunia kerja). Sehingga, ketika mahasiswa ini lulus, mereka tidak mengalami *culture shock* dengan iklim organisasi atau perusahaan. Tetapi dengan metode praktisi yang kita kembangkan sekarang, mahasiswa diharapkan mendapatkan teori sekaligus praktik dari apa yang dia dapatkan tanpa menunggu waktu tertentu seperti magang dan lain sebagainya. FE juga sudah menyiapkan kurikulum yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar FE maupun luar UM atau yang disebut Kurikulum Transdisipliner. Hal ini sudah disepakati dalam Rapat Pimpinan bahwa mahasiswa dapat mengambil sebanyak 15 - 29 sks. Untuk FE sendiri sudah terdapat 7 prodi S1

## Laporan Khusus

yang menyediakan 5 mata kuliah dengan 3 SKS untuk mahasiswa luar.

Menurut Pak Cipto, apakah alternatif pengganti skripsi seperti karya tulis ilmiah/karya seni juga merupakan bentuk merdeka belajar ?

Mahasiswa bisa saja tidak menyusun skripsi lalu digantikan dengan membuat sebuah karya tulis ilmiah/karya seni, namun Fakultas juga perlu untuk menyusun panduan/SOP terkait hal tersebut. Proses persetujuan karya tulis ilmiah/karya seni diakui sebagai alternatif skripsi wajib diketahui dan disetujui oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik. Kita tidak menutup mata bahwa banyak mahasiswa yang cerdas secara teoretis, namun ketika menuangkannya ke dalam skripsi mahasiswa sering mengalami kesulitan. Maka dari itu diberikan alternatif lain. Sebagai contoh adalah Bayu skak yang merupakan seorang Vlogger (Video Blogger) YouTube yang merupakan salah satu alumnus UM. Ia menyanggah gelar sarjana setelah membuat karya berupa film sebagai bentuk penyetaraan skripsi yang disetujui oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik serta Ketua Program Studi.

“FE sendiri sudah melakukan penyetaraan tetapi masih pada tingkat mata kuliah. Salah seorang mahasiswa FE, Ari Gunawan memiliki prestasi untuk mengikuti kegiatan di Korea Selatan selama 3 bulan. Selama mengikuti kegiatan di Korea Selatan, ia memiliki kewajiban untuk menuliskan laporan kegiatan sebagai bentuk penyetaraan perkuliahan yang ditinggalkan

selama 1 semester. Sehingga harus ada rekognisi/pengakuan dengan cara menuliskan laporan kegiatan yang dia lakukan selama disana kepada kami, kemudian kami cek dan setarakan dengan mata kuliah tertentu. *Screening* ini juga harus ketat agar tidak memunculkan kesan “mudah” pada mahasiswa sehingga akan meremehkan penyetaraan ini.

la (Ari Gunawan) pergi ke Korea Selatan membawa nama UM dan sangat disayangkan apabila prestasi tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari kami,” jelasnya.

Contoh lain yang dapat dijadikan gambaran adalah mahasiswa seni rupa. Ia sudah membuat begitu banyak karya seni, seperti patung yang diikutsertakan pada beberapa pameran besar, hanya memiliki keterbatasan kemampuan dalam menulis ilmiah, sehingga prestasinya mengikuti pameran besar tersebut dapat disetarakan. Namun sekali lagi ini harus ditegaskan agar tidak ada kesan “digampangkan” oleh mahasiswa agar kualitas kita tetap baik.

Apakah FE memiliki rencana untuk membuka Prodi yang sesuai dengan kebutuhan di era sekarang?

Sebenarnya hal ini sudah

dibicarakan dan ada peluang untuk pembukaan prodi yakni “Bisnis Digital”. Beberapa kampus yang sudah memiliki program studi ini adalah Universitas Padjajaran dan Universitas Pendidikan Indonesia. Namun kami sendiri tidak kaget ketika kedua universitas tersebut dapat membuka prodi ini karena kedua universitas tersebut merupakan PTN BH (Badan Hukum) yang mana kampus memiliki kebebasan untuk



*Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.*

*Dekan Fakultas Ekonomi*

membuka dan menutup prodi tanpa izin dari kementerian. Tetapi PTN BH bukan faktor utama dari adanya pembukaan prodi tersebut, melainkan Prodi baru ini menjadi suatu kebutuhan di era milenial sekarang ini.

Bagaimana dengan FE UM?, “kami juga berfikir untuk kesana tetapi kami juga harus mempersiapkan SDM terlebih dahulu. Sekarang untuk 1 prodi membutuhkan 5 SDM dan untuk “Bisnis Digital” sendiri membutuhkan tidak hanya ahli dari ekonomi saja, tetapi juga membutuhkan tenaga dari disiplin ilmu yang lain seperti Teknik Informatika dan Ilmu Komputer. Maka persiapan yang harus kami lakukan adalah membuka informasi rekrutmen Dosen baik PNS maupun Non-PNS dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Program Studi.